



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**AMANAT
MENTERI DALAM NEGERI
PADA PERINGATAN
HARI OTONOMI DAERAH KE-XXI
Tanggal 25 April 2017**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Saudara-Saudara sebangsa dan setanah air;

Yth. Para Peserta Upacara.

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas berkat dan ridho-Nya, kita dapat mengikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI pada hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah yang kita laksanakan setiap tahun merupakan momentum untuk mengevaluasi perkembangan kinerja pelaksanaan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Setiap Pemerintah Daerah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai, seraya

mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah. Inilah tujuan utama otonomi daerah yang harus menjadi prioritas kebijakan daerah pada setiap Pemerintah Daerah di Indonesia.

Saudara-Saudara Sekalian;

Tema Hari Otonomi Daerah ke-XXI Tahun 2017 adalah “Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government”. Tema ini memiliki 4 (empat) makna pokok.

Pertama: Pelaksanaan Otonomi Daerah harus mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Kedua: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik, harus dikelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *electronic-government*, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah,

cepat, dan tepat tentang prosedur pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

Ketiga: Ketepatan penyediaan pelayanan publik berbasis *electronic-government*, membutuhkan kemampuan dan integritas yang tinggi dari setiap aparatur Pemerintah Daerah; dan

Keempat: Upaya peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis *electronic-government*, akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (atau *good local governance*) dan aparatur pemerintah daerah yang bersih (atau *clean local government*).

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Saya berharap, setiap Pemerintah Daerah senantiasa berinisiatif untuk mengelola pelayanan publik berbasis *electronic-government*.

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri, sudah cukup banyak Pemerintah Daerah yang mengembangkan *electronic-government* dalam penyediaan pelayanan publik, baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota. Dalam mengelola otonomi daerah, cara-cara konvensional harus ditinggalkan. Pemerintah Daerah harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengembangkan “Program *Smart City* atau Kota Pintar”, untuk mendorong setiap Pemerintah Daerah agar mengembangkan *electronic-government* dalam penyediaan pelayanan publik. Terkait dengan Program *Smart City* ini, juga dikembangkan “Program *City Branding* atau Pencitraan Kota” untuk mendorong setiap Pemda Kota memprioritaskan program pembangunan pada sektor tertentu sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat yang berbasis *electronic-government*.

Program-program tersebut merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Pusat untuk mendorong pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja

pelayanan publik. Kita berharap, kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah senantiasa meningkat dari waktu ke waktu, baik pelayanan publik untuk kepentingan warga negara maupun pelayanan publik untuk kepentingan dunia usaha melalui pelayanan perijinan dalam rangka “kemudahan berusaha, peningkatan investasi, dan peningkatan daya saing daerah”.

Saudara-Saudara Sekalian;

Saat ini terdapat 542 daerah otonom, yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015, ada sejumlah Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja sangat tinggi, namun ada pula Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja yang masih rendah.

Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Manfaatkan seluruh potensi sumber daya daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dengan melibatkan seluruh warga masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Pemerintah Pusat melalui Program Nawa Cita Kabinet Kerja, telah berketetapan untuk “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat melalui berbagai instrumen kebijakan dan program, senantiasa mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan Pemerintah Pusat dalam rangka membangun daerah dan desa adalah alokasi Dana Transfer untuk setiap Daerah Otonom (baik Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus), serta alokasi Dana Desa untuk setiap Desa. Saya berharap, dana transfer dan dana desa tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Wujud utama dari peningkatan kinerja tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat secara intensif mengembangkan program pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah, membuka isolasi pada kawasan terpencil dan pulau-pulau terluar, serta memudahkan jaringan transportasi antar daerah. Saya mengetahui bahwa masing-masing Pemerintah Daerah juga memprioritaskan program pembangunan infrastruktur untuk memudahkan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian di daerah.

Melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah, yang dipadukan dengan pelaksanaan program-program pembangunan nasional, kita berharap akan terwujud peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Saya menghimbau setiap Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi kalangan dunia usaha, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat memberi manfaat ekonomis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Saudara-Saudara Sekalian;

Berkenaan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXI Tahun 2017 ini, Saya menyampaikan

lima arahan pokok bagi seluruh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Pertama: Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus senantiasa terjalin hubungan yang harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD sebagai sesama Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, termasuk hubungan yang harmonis dengan seluruh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Kedua: Tingkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan profil pemerintahan daerah yang bersih, melalui reformasi birokrasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, baik Kepala Daerah, DPRD, maupun pegawai negeri sipil.

Ketiga: Prioritaskan program pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didukung dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keempat: Tingkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah di tengah percaturan ekonomi global dan

regional, termasuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN, melalui pengelolaan potensi ekonomi daerah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha.

Kelima: Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selamat Hari Otonomi Daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkahi Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO